



DISPORAPAR
KABUPATEN PROBOLINGGO

Rencana **STRATEGIS**

2025 - 2029



DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. RENSTRA akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025.

Probolinggo, September 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN PROBOLINGGO


HERI MULYADI, S.STP, M.Si
19750811 199603 1 003
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	II-2
2.1.1.2 Tugas pokok dan Fungsi Sekertaris....	II-Error! Bookmark not defined.
2.1.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional.....	II-4
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-10
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-13
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	II-15
BAB III TUJUN DAN SASARAN	III-1
3.1 Tujuan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Sasaran Perangkat Daerah	III-2
3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	III-6
3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran ...	III-12
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Uraian Porgram	IV-1
4.2 Uraian Kegiatan	IV-5
4.3 Uraian Indikator Kinerja	IV-35

4.4 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif	IV-37
4.5 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-60
4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kepemeudaan, Olahraga dan Pariwisata 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemeudaan, Olahraga dan Pariwisata	IV-64
4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-64
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)II-9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.....II-10
Tabel2.3	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PDII-16
Tabel 3.1.a	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataIII-3
Tabel 3.1.b	Definisi Operasional, Formulai Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029III-4
Tabel 3.2	Penahapan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten ProbolinggoIII-11
	Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan PariwisataIII-13
Tabel4.1	Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.....IV-2
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olaharag dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.....IV-10
Tabel 4.3	Indikator Kinerja DaerahIV-37
Tabel 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan IV-38
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Priorotas Pembangunan Daerah IV-63
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata IV-64
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata IV-64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
Pariwisata Kabupaten ProbolinggoII-7

Gambar 3.1 Skema pengembangan desa wisata III-8

KATA PENGANTAR


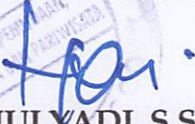
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Probolinggo dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. RENSTRA akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025.

Probolinggo, September 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN PROBOLINGGO



HERI MULYADI, S.STP, M.Si
19750811 199603 1 003
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas	II-2
2.1.1.2 Tugas pokok dan Fungsi Sekertaris.....	II-2
2.1.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional	I-4
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-10
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-12
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah ...	II-13
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	II-15
BAB III TUJUN DAN SASARAN	III-1
3.1 Tujuan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Sasaran Perangkat Daerah	III-2
3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	III-6
3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran	III-12
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Uraian Porgram.....	IV-1
4.2 Uraian Kegiatan	IV-5
4.3 Uraian Indikator Kinerja	IV-35

4.4 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif	IV-37
4.5 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-60
4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Kepemeudaan, Olahraga dan Pariwisat 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemeudaan, Olahraga dan Pariwisata	IV-64
4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-64
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	II-9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo	II-10
Tabel 2.3	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	II-16
Tabel 3.1.a	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	III-3
Tabel 3.1.b	Definisi Operasional, Formulai Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.2	Penetapan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo	III-11
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	III-13
Tabel 4.1	Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	IV-2
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo	IV-10
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	IV-37
Tabel 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	IV-38
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-63
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	IV-64
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	IV-64

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga
Dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.....II-7
- Gambar 3.1 Skema Pengembangan Desa WisataIII-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo yang berlandaskan pada Kabupaten Probolinggo berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Selain itu, RENSTRA berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata berkontribusi dalam

mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan urusan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Dalam menyusun RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, penyusunan rancangan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, hingga penetapan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Selain itu, dokumen RENSTRA memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain , RENSTRA K/L (Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif), RENSTRA Propinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029. Penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata juga mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Probolinggo.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo 2025-2029;
 26. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
 - 2.2.2 Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo beserta indikator kerjanya.

- 3.1 Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
- 3.2 Sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dijelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Indikator kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. UPT

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sesuai Pasal (5) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal (5) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (6), mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencanaprogram dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (7), mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tanggadan barang milik daerah;
- c. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 melaksanakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional, dsb.

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis program organisasi kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana. Kepala Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (181), mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis, pendataan organisasi kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan program organisasi kepemudaan dan, keolahragaan, serta sarana dan prasarana;
- c. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
- d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program organisasi kepemudaan, keolahragaan, serta sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata. Kepala Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (182) ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- c. Penyelenggaraan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- d. Pelaksanaan pemberian ijin/rekomendasi di bidang pariwisata;
- e. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan sumber daya pariwisata;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal (183), mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Penyelenggaraan pengembangan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;

- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

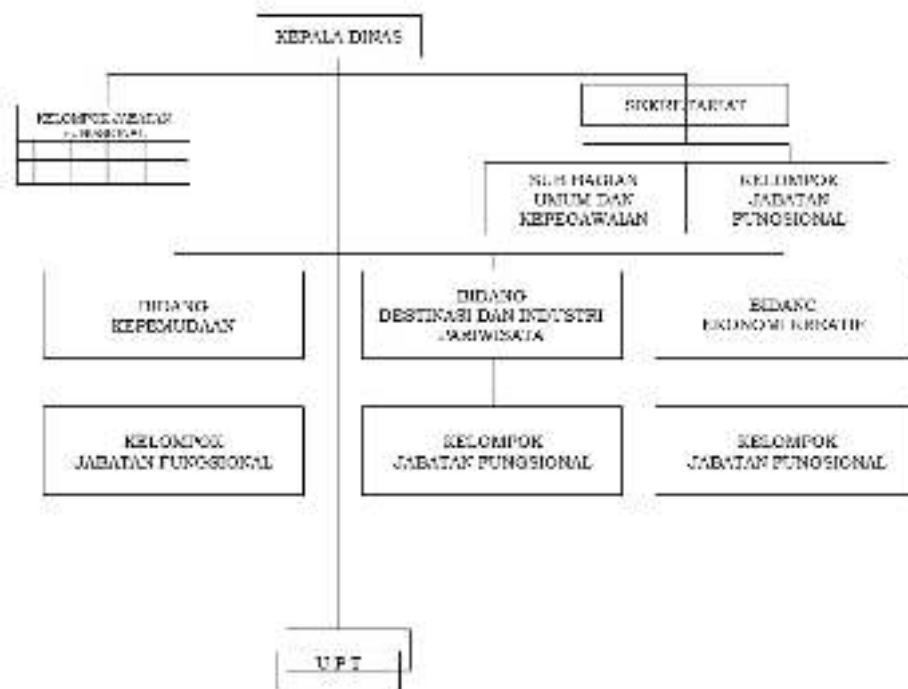
Kelompok jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Pasal (184) adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator;
- d. Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (c) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- e. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan (d) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah;
- f. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (a), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian;

- i. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- j. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (a), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- k. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf (a), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan UPT sebagaimana disebutkan dalam Pasal (186) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf g ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional, dan 58 (lima puluh delapan) orang staf. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang, yang terdiri dari:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 3 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsional : 8 Orang
5. Staf/Non Eselon : 58 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebanyak 71 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

1. Sarjana S-2 : 8 Orang
2. Sarjana S-1 : 10 Orang
3. Diploma -3 : 1 Orang
4. SLTA : 10 Orang
5. SLTP : 1 Orang
6. SD : 1 Orang

Sebagian besar aparatur pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo memiliki latar belakang pendidikan S1 dan SMA. Para pejabat eselon memiliki latar belakang Pendidikan S2. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh rata-rata aparatur pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo cukup mumpuni untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.	
1	Tanah (KIB A)	14	10.419.318.597,00	
2	Peralatan dan Mesin (KIB B)	1.886	8.076.783.109,00	
3	Gedung dan Bangunan (KIB C)	184	82.120.379.946,91	
4	Jalan Irigasi Jaringan (KIB D)	44	17.271.536.088,27	
5	Aset Tetap Lainnya (KIB E)	113	390.113.642,00	

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Baseline Tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)			1,57	1,84	1,90	1,95	2,01	2,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indeks Pembangunan Pemuda (%)			55,00	55,20	55,40	55,60	55,80	56,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri (%)			13,49	13,61	13,74	13,87	14,00	14,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)			15,17	15,30	15,42	15,55	15,68	15,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jumlah Medali yang diperoleh dalam Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional (Buah)			175	177	178	179	180	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengeluaran wisatawan (Milyar)			119,39	127,60	135,34	144,48	150,75	154,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (Nilai)			0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Jika menilik capaian indikator kinerja pada 5 tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja kunci, maka terjadi fluktuasi capaian yang cukup signifikan pada indikator tiga indikator utama yang mencerminkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, serta peningkatan prestasi olahraga. Indikator pertama, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, menunjukkan peningkatan dari 0,10% pada tahun 2020 menjadi 13,49% pada tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kebijakan yang mendorong kewirausahaan pemuda dan pelatihan keterampilan yang lebih fokus pada pengembangan usaha mandiri. Lonjakan tajam pada tahun 2021 (10,30%) dapat disebabkan oleh perubahan cara penghitungan indikator yang lebih luas, serta meningkatnya minat pemuda untuk berpartisipasi dalam sektor ekonomi mandiri pasca-pandemi. Kemudian indikator kedua, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, terjadi lonjakan yang sangat besar pada tahun 2021 (167,45%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (0,15%). Lonjakan ini disebabkan oleh adanya perubahan cara penghitungan yang mencakup lebih banyak jenis organisasi yang sebelumnya tidak terhitung. Setelah 2021, angka ini kembali menurun secara signifikan, mencerminkan kemungkinan ketidakstabilan atau perubahan dalam program atau kebijakan yang memengaruhi keterlibatan pemuda dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan

Untuk indikator ketiga, peningkatan prestasi olahraga, terjadi fluktuasi yang cukup tajam. Capaian pada tahun 2020 adalah 27, yang meningkat menjadi 102 pada tahun 2021, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2023 (1) sebelum kembali meningkat menjadi 13 pada tahun 2024. Penurunan yang tajam pada tahun 2023 disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas olahraga, sementara peningkatan pada tahun 2024 menunjukkan upaya pemulihan dan peningkatan prestasi olahraga, meskipun tidak sebesar tahun 2021. Capaian kinerja bidang kepemudaan dan olahraga menunjukkan adanya fluktuasi

yang dipengaruhi oleh kebijakan, perubahan cara penghitungan indikator, serta dampak pandemi

Sedangkan pada urusan pariwisata, capaian pengeluaran wisatawan Kabupaten Probolinggo pada periode 2022 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Pada tahun 2022, target pengeluaran wisatawan ditetapkan sebesar Rp16,37 miliar, namun realisasi yang tercapai mencapai Rp31,67 miliar. Pencapaian lebih dari 190 persen ini menjadi penanda penting kebangkitan sektor pariwisata setelah terdampak pandemi, sekaligus menegaskan adanya peningkatan minat kunjungan wisatawan. Memasuki tahun 2023, target pengeluaran wisatawan meningkat menjadi Rp18,37 miliar. Namun, realisasi justru melampaui ekspektasi dengan capaian Rp102,87 miliar atau lebih dari 560 persen dari target. Lonjakan yang sangat signifikan ini tidak terlepas dari keberhasilan strategi promosi destinasi wisata unggulan Kabupaten Probolinggo, khususnya daya tarik wisata Bromo dan wisata bahari yang semakin dikenal luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2024, target pengeluaran wisatawan kembali ditetapkan lebih tinggi yaitu Rp104,93 miliar. Realisasi yang diperoleh mencapai Rp119,39 miliar atau sekitar 114 persen dari target. Meskipun persentase capaian relatif tidak setinggi pada tahun sebelumnya, namun hasil ini menandakan konsistensi pertumbuhan pariwisata sekaligus memperlihatkan proses konsolidasi menuju pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, capaian pengeluaran wisatawan selama tiga tahun terakhir tidak hanya menunjukkan pemulihan, melainkan juga pertumbuhan pesat sektor pariwisata Kabupaten Probolinggo. Perkembangan ini mengukuhkan posisi Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur dengan potensi daya tarik yang terus berkembang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagian besar adalah masyarakat, namun jika

dipertajam untuk masing-masing bidang, dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Terkait dengan pemuda, sasarannya adalah masyarakat, khususnya yang berada dalam batasan usia 16 – 30 tahun. Begitu pula dengan yang terkait urusan olahraga, yang menjadi kelompok sasarannya adalah Masyarakat baik itu atlet, pelajar sebagai calon atlet, maupun lembaga.

b. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Kelompok sasaran pada bidang yang menangani urusan pariwisata ini juga masyarakat luas, baik yang tergabung dalam kelompok (POKDARWIS, paguyuban, asosiasi (Persatuan Hotel & Restoran Indonesia), maupun perorangan seperti wisatawan dan pemilik usaha jasa wisata lainnya.

c. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang ekonomi kreatif yang merupakan bagian dari urusan pariwisata juga mempunyai kelompok sasaran Masyarakat, yaitu para peaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat ini menjadi sasaran dalam segala aktivitas pada bidang ini terutama dalam hal fasilitasi, pendampingan maupun pelatihan-pelatihan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; pelaksanaan administrasi di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Pembangunan pada bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata di Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun terakhir menunjukkan beberapa capaian positif, namun masih menyisakan berbagai persoalan strategis yang perlu segera direspons secara sistematis. Permasalahan tersebut muncul baik dari dinamika internal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, maupun dari pengaruh eksternal baik secara global, nasional, regional maupun isu-isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian penting dalam dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025-2029, RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur, RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi Jawa Timur, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- A. Permasalahan yang memiliki relevansi langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo :
- Dispartitas pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo.
 - Rendahnya kapasitas SDM pariwisata lokal, termasuk Pokdarwis dan pelaku wisata berbasis masyarakat (*community based tourism*).
 - Lemahnya ekosistem pendukung pelaku ekonomi kreatif seperti inkubasi, pemasaran, permodalan, dan ruang kreatif.
 - Terbatasnya fasilitasi ekonomi kreatif khususnya yang menyangkut masalah standarisasi produk kreatif dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual).
 - Penurunan daya dukung lingkungan kawasan wisata, terutama di destinasi wisata dengan jenis wisata alam yang belum dilengkapi dengan mekanisme komprehensif dalam pengelolaan dampak lingkungan.

- Pengelolaan sampah dan limbah kegiatan olahraga dan pariwisata serta festival/*event* yang kurang optimal akibat minimnya sistem pengelolaan limbah sampah terpadu.
- Kurangnya partisipasi pemuda, baik secara individu maupun organisasi, dalam menggali potensi diri maupun lingkungan sekitarnya baik dalam bidang pariwisata, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif.
- Kurangnya tenaga keolahragaan yang berkualitas dan sarpras olahraga.
- Belum optimalnya penjurangan bakat atlet usia dini.

B. Permasalahan Lingkungan Hidup yang Relevan dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan adaptasi terhadap krisis lingkungan global, terdapat beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan pada sektor pemuda, olahraga dan pariwisata yaitu kesadaran dan kapasitas pemuda serta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif masih belum optimal dalam menerapkan prinsip ramah lingkungan dan pengelolaan dampak ekologis.

Kegiatan-kegiatan kepemudaan, penyelenggaraan *event* olahraga dan pariwisata serta kreasi/produksi barang kreatif seperti kriya, kuliner, dan fesyen seringkali menghasilkan limbah [adat dan emisi karbon yang belum dikelola secara baik. Tekanan terhadap daya dukung lingkungan semakin besar dengan minimnya sistem maupun kesadaran Masyarakat untuk mendaur ulang sampah, kurangnya regulasi berbasis lingkungan dalam penyelenggaraan *event*, festival, pameran/bazar, serta belum optimalnya penerapan *eco-tourism* dan *green design* dalam pengelolaan dan pengembangan pada sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata maupun ekonomi kreatif.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Merujuk pada telaahan di atas, maka isu strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dapat ditarik sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISPORAPAR	PERMASALAHAN DISPORAPAR	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DISPORAPAR
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<ul style="list-style-type: none"> • Destinasi wisata unggulan; • Kawasan strategis pariwisata nasional; • Kabupaten Probolinggo sebagai gerbang wisata Jawa Timur; • Produk kreatif berbasis kearifan lokal; • Platform digital dan e-commerce untuk pemasaran produk kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispartitas pembangunan destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo; • Rendahnya kapasitas SDM pariwisata lokal, termasuk Pokdarwis dan pelaku wisata berbasis komunitas; • Lemahnya ekosistem pendukung pelaku ekonomi kreatif seperti inkubasi, pemasaran, permodalan, dan ruang kreatif; • Terbatasnya fasilitasi ekonomi kreatif, khususnya yang menyangkut masalah standarisasi produk kreatif dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan daya dukung lingkungan kawasan wisata, terutama di destinasi wisata alam yang belum dilengkapi dengan mekanisme komprehensif dalam pengelolaan dampak lingkungan; • Pengelolaan sampah dan limbah kegiatan olahraga dan pariwisata serta festival/event yang kurang optimal akibat minimnya sistem pengelolaan limbah sampah terpadu • Kurangnya wisata berbasis budaya dan ramah lingkungan. Pariwisata cenderung eksploitatif tanpa memperhatikan nilai budaya lokal dan keberlanjutan; • Tingginya limbah dari sub sektor ekonomi kreatif yang belum dikelola secara ramah lingkungan, seperti kriya, kuliner dan fesyen. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sustainable Tourism (UNWTO/ United Nations World Tourism Organization)</i> dan implementasi pariwisata berkelanjutan • Pariwisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism</i>) dan <i>responsible travel movement</i> yang bertujuan meminimalkan dampak negatif dari aktivitas perjalanan wisata terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal, serta memaksimalkan manfaat positif yang dapat diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi nasional pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan; • Rancangan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN); • Kebijakan perlindungan HKI dan penguatan daya saing produk kreatif; • Komitmen Indonesia untuk mencapai <i>net zero emission</i> di 2060 	<ul style="list-style-type: none"> • Program 100 desa wisata; • Program 100 event wisata; • Pembentukan Unit Kesehatan Wisata; • Perubahan tren wisata ke arah <i>eco-tourism</i> maupun <i>wellness tourism</i> yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung <i>sustainable tourism</i>; • Program 10 rumah kreatif milenial; • Program Milenial Job Center : Hub ekonomi kreatif di setiap kecamatan; • Lemahnya perlindungan HKI terhadap karya kreatif menyebabkan sering ditirunya karya tersebut oleh orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi model pariwisata dari <i>mass tourism</i> menuju <i>sustainable</i> dan <i>responsible tourism</i> yang berbasis masyarakat, ramah lingkungan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo , khususnya di kawasan 3B (Bromo, Bentar, Bermi); • Penyediaan ruang kreatif ataupun <i>creative hub</i> (pusat inovasi ekonomi kreatif di daerah); • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan untuk mendorong inovasi, penciptaan lapangan kerja dan daya saing • Fasilitasi standarisasi produk kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DISPORAPAR	PERMASALAHAN DISPORAPAR	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DISPORAPAR
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pemuda yang dimiliki oleh Kabupaten Probolinggo • Cabang-cabang olahraga baru yang mendulang prestasi; • Pengelolaan sarpras olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi pemuda, baik secara individu maupun organisasi, dalam menggali potensi diri maupun lingkungan sekitarnya baik dalam bidang pariwisata, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif; • Kurangnya tenaga keolahragaan yang berkualitas dan sarpras olahraga ; • Belum optimalnya penjangkaran bakat atlet usia dini 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya partisipasi pemuda dalam pelestarian lingkungan. Banyak pemuda belum terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan seperti penghijauan, pengelolaan sampah, atau mitigasi bencana; • Tingkat pengangguran terbuka pemuda tinggi. mendorong pelatihan kewirausahaan hijau (<i>green entrepreneurship</i>) seperti ekowisata, pengolahan limbah, dan industri kreatif berkelanjutan; • Kurangnya fasilitas olahraga yang ramah lingkungan. Banyak sarana olahraga belum menerapkan konsep <i>green building</i> dan efisiensi energi.; • Limbah dari event olahraga. <i>Event</i> besar menghasilkan sampah plastik, limbah makanan, dan emisi transportasi yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Persaingan global dalam dunia kerja semakin ketat karena revolusi industri 4.0; • Meningkatnya pengangguran pemuda yang dapat memicu masalah sosial dan ekonomi; • Terbatasnya ruang terbuka hijau dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas olahraga berbasis komunitas; • Minimnya kompetensi SDM dalam pengelolaan fasilitas olahraga yang berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya pemuda yang menguasai teknologi digital, inovasi, dan kewirausahaan; • Peningkatan emisi dan sampah dari <i>event</i> olahraga besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya mobilitas tenaga kerja muda, menuntut peningkatan ketrampilan digital, kewirausahaan dan kemampuan berbahasa asing; • Program 100 Kompetisi Olahraga berbasis kearifan local; • Program Revitalisasi Stadion Olahraga; • Tren <i>sport tourism</i> berpotensi besar jika dikembangkan secara kolaboratif dengan daerah lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Potensi dan Ketrampilan Pemuda; • Belum maksimalnya peran organisasi kepemudaan sebagai agen perubahan; • Peningkatan fasilitas dan infrastruktur olahraga; • Kurangnya kompetisi olah raga di tingkat daerah

Berdasarkan isu strategis tersebut di atas maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dapat melihat tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi target dan capaian kerjanya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya keanekaragaman objek daya tarik wisata, mulai dari wisata alam, wisata bahari, dan juga wisata buatan;
- 2) Pariwisata menjadi salah satu bidang unggulan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi;
- 3) Masuknya salah satu objek wisata alam di Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu destinasi prioritas nasional;
- 4) Adanya Rancangan Peraturan Presiden Rencana Induk Destinasi Pariwisata Daerah (RIDPN) yang menjadi dasar untuk mengatur dan mengelola sektor kepariwisataan secara terpadu;
- 5) Banyaknya jumlah pemuda di Kabupaten Probolinggo.

b. Kelemahan

- 1) Masih rendahnya SDM pariwisata yang bisa mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya;
- 2) Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pasca pelatihan terhadap SDM pariwisata;
- 3) Minimnya pelatihan tentang kewirausahaan untuk pemuda;
- 4) Kurangnya sarpras olahraga serta tenaga keolahragaan;

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1) Berkembangnya era digital membuka peluang untuk melakukan strategi pemasaran pariwisata yang baru untuk membangkitkan kembali pariwisata daerah seperti sebelum terjadinya pandemi;
- 2) Perkembangan teknologi semakin membuka ruang bagi masyarakat (dengan jangkauan yang lebih luas) dalam mengakses informasi-informasi pariwisata;
- 3) Munculnya komunitas-komunitas kreatif yang bisa menjadi potensi bagi ekonomi kreatif untuk dikembangkan;

b. Tantangan

- 1) Melakukan perbaruan (*update*) informasi secara berkala di seluruh bidang (kepemudaan, olahraga, dan pariwisata);
- 2) Menciptakan suatu cinderamata khas yang bisa dibawa dan dikenang oleh wisatawan;
- 3) Membuka ruang kreatif bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan hasil karya yang bisa diapresiasi serta dibeli oleh masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo selaras dengan RPJMD 2025 – 2029, dengan fokus pada pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan pemuda. Penetapan tujuan memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan Renstra PD dirumuskan untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah selama lima tahun, sementara sasaran merinci tahapan dan fokus prioritas untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan visi Bupati Kabupaten Probolinggo yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah, Religius Serta Eksis Berdaya Saing)”** dengan misi yang telah ditetapkan, Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan misi harus memiliki keterkaitan dengan pokok-pokok visi.

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mengemban 2 (dua) misi yaitu :

- a. **Misi ke-2 (SAE EKONOMI)** yakni Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan. Salah satu tujuan dari misi ini adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Walaupun pariwisata tidak disebutkan secara langsung dalam misi ini, namun pariwisata merupakan salah satu

sektor strategis yang dapat menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada ketahanan ekonomi daerah;

- b. **Misi ke-3 (SAE PENDIDIKAN dan KESEHATAN)** yakni Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau. Terkait dengan SDM Unggul, urusan pemuda dan olahraga menjadi bagian dari SDM yang berpotensi menjadi SDM unggul baik dalam bidang pariwisata, kewirausahaan dan ekonomi mandiri, maupun olahraga.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan RPJMD 2025-2029 yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah tujuan pada masing-masing misi (ke-2 dan ke-3) yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan” dan “Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan”. Sejalan dengan tujuan RPJMD, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menetapkan tujuannya :

1. Meningkatnya Pemberdayaan pemuda dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda; dan
2. Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah dengan indikator kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum.

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sebagaimana tujuan yang diampu, maka sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata adalah :

1. Meningkatnya daya saing pemuda dengan indikator :
 - (a). Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri,
 - (b). Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan;dan
2. Meningkatnya prestasi olahraga dengan indikator kinerja Jumlah medali yang diperoleh dalam kejuaraan tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional;

3. Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah, dengan indikator pengeluaran wisatawan; dan
4. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola Perangkat Daerah dengan indikator Prosentase kenaikan LHE AKIP PD

**Tabel 3.1.a Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata**

NSPK DAN SASARAN RPJMD 2025-2029 YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
- Penyediaan Sarpras Kepemudaan - Pembinaan dan pengembangan olahraga	Meningkatnya Pemberdayaan pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56	56,2	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,57	1,84	1,9	1,95	2,01	2,06	2,12	
	Meningkatnya pengembangan sektor usaha berbasis potensi unggulan daerah	Meningkatnya daya saing pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	13,49	13,61	13,74	13,87	14	14,12	14,25	
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)	15,17	15,3	15,42	15,55	15,68	15,8	15,93	
	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional (Medali)	175	176	177	178	179	180	181		
	Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah	Pengeluaran wisatawan (Milyar Rupiah)	119,39	127,6	135,34	144,48	150,75	154,81	160,44		
	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48		

Definisi operasional dan formulasi untuk masing-masing indikator di atas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.b Definisi Operasional, Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA HITUNG	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pemberdayaan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan.	<i>Total Nilai (Domain Pendidikan; Domain Kesehatan dan Kesejahteraan; Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja; Domain Partisipasi dan Kepemimpinan serta Domain Gender dan Diskriminasi) / 5</i>	Bidang PPM Bapelitbangda	BAPELITBANGDA
2.	Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Rasio PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) adalah persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman terhadap total PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	$\frac{\text{PDRB ADHB Penyedia Akmamin}}{\text{Total PDRB}} \times 100$	Bidang ESDA Bapelitbangda	BAPELITBANGDA
1.	Meningkatnya daya saing pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri	Peran serta pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tahun (N)}}{\text{Jumlah pemuda se-Kabupaten}} \times 100$	Data Tahunan	Bidang Pemyda & Olahraga
		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Peran serta pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda dalam Orgsasi Kepemudaan dan Orgsasi Kemasyarakatan Tahun (N)}}{\text{Jumlah pemuda se-Kabupaten}} \times 100$	Data Tahunan	Bidang Pemyda & Olahraga

		dan Organisasi Sosial Masyarakat				
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan resmi di tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	<i>Jumlah Medali yang diperoleh Tahun (N)</i>	Data Tahunan KONI	Bidang Pemyda & Olahraga
3.	Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah	Pengeluaran wisatawan	Pengeluaran wisatawan adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata, baik sebelum keberangkatan, selama berada di destinasi, maupun dalam perjalanan pulang, untuk berbagai kebutuhan konsumsi maupun aktivitas lainnya yang terkait dengan perjalanan wisata	<i>Rata-rata pengeluaran wisatawan Tahun (N) x Rata-rata jumlah kunjungan wisata Tahun (N)</i>	Data Tahunan	Bidang Industridan Destinasi Pariwisata
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai LHEAKIP PD adalah nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah atas hasil evaluasi kinerja PD tahun sebelumnya (N-1)	$\frac{\text{Nilai LHE AKIP Tahun (N-1)} - \text{Nilai LHE AKIP Tahun (N-2)}}{\text{Nilai LHE AKIP Tahun (N-2)}} \times 100$	Data Tahunan dari Inspektorat	Sekretariat

3.3 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memiliki beberapa strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Pengembangan destinasi wisata

Kawasan **“SEGITIGA EMAS”** yaitu **BROMO, BENTAR DAN BERMI** menjadi pusat pengembangan wisata yang dikenal dengan konsep 3B. Dalam dokumen RIPPARDA terdapat 4 kawasan pengembangan yaitu Bromo, Bentar, Bermi dan Bhinor. Konsep 3B disampaikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai konsep pengembangan yang tetap selaras dengan dokumen RIPPARDA dimana Bentar yang secara geografis berada di wilayah Tengah, mewakili wisata bahari di sepanjang garis pantai wilayah Kabupaten Probolinggo serta menjadi mercusuar untuk wisata bahari di Kabupaten Probolinggo.

Daya tarik kuat Bromo sebagai ikon Kabupaten Probolinggo bahkan Jawa Timur, menjadi pendorong berkembangnya destinasi lain yang dapat memperkuat posisi pariwisata Kabupaten Probolinggo, yaitu kawasan Bermi dan Bentar. Konsep pengembangan 3B mengarahkan Kabupaten Probolinggo bukan sebagai daerah transit dalam *travel pattern* wisatawan Jawa yang terkenal dengan konsep 3B (Bromo, Bali dan Borobudur) namun merubah *positioning* Kabupaten Probolinggo sebagai destinasi wisata yang berkualitas dan memiliki keunikan khusus, khususnya sebagai **Gerbang Wisata Jawa Timur**. Pengembangan Kabupaten Probolinggo sebagai pintu gerbang wisata Jawa Timur memperhatikan hal berikut :

1. Pengembangan Zona Inti Wisata

- (a). Revitalisasi 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas)
- (b). Inovasi produk wisata berbasis aktivitas baru
- (c). Peningkatan kualitas destinasi & wisata minat khusus
- (d). Penguatan branding daerah dan event pariwisata
- (e). Peningkatan layanan : keramahan, kenyamanan, konektivitas

2. Konektivitas Kawasan Inti

- (a). Optimalisasi hub transportasi dan infrastruktur pendukung
- (b). Peningkatan layanan transportasi antar destinasi wisata
- (c). Pengembangan paket perjalanan terintegrasi

3. Pengembangan Kawasan Pendukung

- (a). Pengembangan atraksi baru dan peningkatan yang ada
- (b). Penyediaan konektivitas inti- pendukung
- (c). Penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata
- (d). Peningkatan fasilitas pendukung

Dengan strategi yang baru ini diharapkan pariwisata di Kabupaten Probolinggo dapat mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan melalui *Community Based Tourism (CBT)*, mampu menjadi pendorong kemajuan perekonomian rakyat di pedesaan sehingga mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, membuka peluang kerja, meningkatkan kesempatan berusaha, meningkatkan kepemilikan dan kontrol masyarakat lokal terhadap pengelolaan sumber daya desa, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Program prioritas Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang telah disiapkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah **“100 Desa Wisata”**. Desa Wisata menjadi alternatif destinasi wisata baru di Kabupaten Probolinggo. Desa Wisata dapat menunjang destinasi utama yang sudah ada. Pengembangan desa wisata memberikan peluang dan manfaat yang besar untuk (a). Memperkuat jati diri kedesahan; (b). Meningkatkan mutu sumberdaya manusia (SDM), (c). Mengaktualisasi nilai budaya; (d). Menegakkan keamanan dan ketertiban; (e). Membangkitkan ekonomi; (f). Melestarikan lingkungan; (g). Menata ruang dan permukiman. Strategi

pendampingan 100 desa wisata dapat dijabarkan dalam skema berikut :



Gambar 3.1. Skema pengembangan desa wisata

Pengembangan desa wisata di 3 kawasan (Bromo, Bentar dan Bermi) baik dari sisi aksesibilitas, amenities, atraksi wisata, budaya serta ekonomi kreatif akan menjadi cikal bakal terwujudnya Kabupaten Probolinggo sebagai Gerbang Wisata Jawa Timur.

b. Pengembangan *event* wisata

Penyelenggaraan *event* menjadi bagian dari strategi pemasaran atau pengenalan pariwisata di Kabupaten Probolinggo. **100 Event Wisata** merupakan program prioritas yang telah disiapkan seiring dengan pengembangan destinasi wisata. Penyelenggaraan *event* memiliki tujuan utama untuk (a) Promosi dan Pemasaran yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap suatu produk, jasa, atau destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo; (b) Pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui penjualan barang dan jasa, serta meningkatkan kesempatan kerja, (c) Pelestarian budaya dan tradisi dengan terlaksananya pelestarian dan promosi budaya dan tradisi lokal kepada masyarakat luas. Penyelenggaraan *event* wisata juga menjadi bagian dari pengembangan atraksi wisata berbasis 3 matra (matra dirga, matra nusa, matra tirta) yang ada di Kawasan 3B.

Penyelenggaraan *event-event* besar berskala nasional maupun internasional harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi seperti Trail Run Ultra, Festival Arung Jeram, Festival Paralayang, *Horse Touring*, *Downhill Sentul*, Gading, Triathlon, Upacara Adat Yadnya Kasada, Festival 7 Ranu (*Seven Lakes Festival*, Jambore Ekowisata, Tour de Bromo, Festival Tembakau, Bromo *Traditional Fashion Show*, dan lain-lain.

c. Pembentukan Unit Kesehatan Wisata (UKW)

Unit Kesehatan Wisata adalah bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang disiapkan untuk mendukung kegiatan pariwisata, terutama untuk menjaga, mencegah, dan menangani masalah kesehatan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Fungsi utama dari UKW ini diantaranya adalah memberikan pelayanan medis darurat di lokasi wisata; Pemantauan sanitasi dan kebersihan di lokasi wisata; Koordinasi rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat; Pencegahan penyakit (edukasi kesehatan, vaksinasi). Bentuk dari UKW dapat berupa pos kesehatan sementara, klinik wisata, puskesmas pariwisata, ambulans siaga maupun tim mobil Kesehatan. UKW juga melibatkan beberapa unsur dari dinas yang terkait.

d. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha pariwisata, dan dunia pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai *workshop* pengembangan kapasitas SDM.

e. Pengembangan jiwa kewirausahaan

f. Sepuluh (10) rumah kreatif milenial

Hal ini merupakan strategi yang dilaksanakan untuk Mengatasi tingginya angka pengangguran, khususnya lulusan SMA, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Probolinggo. Fokus dari stratgei ini Adalah pada pengembangan keterampilan wirausaha dan inovasi bagi generasi muda dengan mendorong keterlibatan generasi milenial dalam industri kreatif dan sektor produktif lainnya untuk menekan angka pengangguran.

g. Milenial *job center* : Hub ekonomi kreatif di setiap kecamatan

Menciptakan hub ekonomi kreatif di setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo, dengan memanfaatkan kantor

kecamatan sebagai pusat kegiatan. Setiap Milenial *Job Center* akan menyediakan fasilitas dan pelatihan bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan di bidang ekonomi kreatif, seperti *digital marketing*, desain grafis, fotografi, dan produksi konten. Selain itu, program ini akan mendukung mereka dalam mengakses peluang kerja dan proyek kolaboratif melalui jaringan kerja yang dibangun di setiap pusat. Dengan adanya Milenial *Job Center*, diharapkan anak muda di setiap kecamatan dapat lebih mudah mendapatkan pelatihan, akses teknologi, dan peluang kerja, sehingga mereka dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah mereka

h. Penyelenggaraan 100 Kompetisi Olahraga berbasis kearifan local
Menghidupkan kembali olahraga tradisional dan memperkaya budaya olahraga di Kabupaten Probolinggo melalui penyelenggaraan 100 kompetisi berbasis kearifan lokal. Program ini akan melibatkan berbagai komunitas, sekolah, dan masyarakat umum dalam kompetisi olahraga tradisional seperti egrang, gobak sodor, dan panjat pinang, yang memiliki nilai budaya dan sejarah bagi masyarakat setempat. Dengan adanya 100 Kompetisi Olahraga Berbasis Kearifan Lokal, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih mengenal dan mencintai olahraga tradisional sekaligus menjaga kearifan lokal yang kaya. Program ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana kompetitif yang sehat dan mempererat solidaritas antar warga.

i. Peningkatan kualitas pelatih dan tenaga pendukung
Hal ini merupakan upaya strategis untuk memastikan proses pembinaan dan pengembangan olahraga dilakukan secara profesional, terukur, dan berbasis ilmu pengetahuan (*sport science*). Pelatih dan tenaga pendukung memegang peran kunci dalam membentuk atlet yang berprestasi, sehat, serta memiliki mental kompetitif sesuai standar nasional maupun internasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo, maka diperlukan perumusan penahapan pembangunan pada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Probolinggo Tahun 2025 – 2029. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan perangkat daerah yang selaras dengan penahapan pembangunan pada RPJMD Kabupaten Probolinggo. Penahapan pembangunan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Penahapan RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo

DOKUMEN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RPJMD 2025-2029	Penguatan pondasi layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan menuju Kabupaten Probolinggo berdaya saing	Percepatan penguatan pondasi layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan disertai penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi inklusif berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Pemantapan pondasi infrastruktur yang berkualitas dan percepatan penguatan pondasi transformasi sosial ekonomi yang didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, bersih dan akuntabel	Pemantapan pondasi transformasi sosial ekonomi serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas	Perwujudan percepatan transformasi sosial, ekonomi serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan
RENSTRA DISPORAPAR 2025-2029	Pembangunan infrastruktur (jalan akses ke destinasi wisata, fasum, penunjuk arah), paket wisata awal, promosi awal untuk pengembangan dasar desa wisata	Penguatan pengelolaan kelembagaan (Pokdarwis, BUMDes), Standarisasi Layanan (pelatihan <i>hospitality</i> , CHSE)	Penguatan pengelolaan kelembagaan (Pokdarwis, BUMDes), Standarisasi Layanan (pelatihan <i>hospitality</i> , CHSE)	Diversifikasi produk desa wisata, penguatan SDM pariwisata, sertifikasi dan legalitas, pemasaran digital dan kemitraan	Kemandirian dan keberlanjutan desa wisata

DOKUMEN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Pemetaan potensi pemuda (minat, bakat, kompetensi, masalah yang dihadapi); - Penguatan nilai karakter, wawasan kebangsaan, serta sikap kepemimpinan dasar	Pengembangan kapasitas agar pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial kemasayarakatan (Pelatihan ketrampilan teknis/ <i>hard skills</i> : kewirausahaan, ekraf, teknologi digital, olahraga & seni, kepemimpinan & organisasi	Pemberdayaan pemuda dengan memberikan akses dan kesempatan kepada apemuda untuk mengimplementasikan ketrampilan yang dimiliki	Pendampingan usaha pemuda, pengembangan program wirausaha pemuda berbasis potensi lokal, Pemberian ruang kreatif seperti <i>youth center, co-working space</i> , atau studio kreatif, membangun jejaring kemitraan	Kemandirian, dimana pemuda mampu menjadi agen perubahan (menciptkana dampak positif bagi masyarakat luas). Organisasi pemuda mampu menginisiasi program tanpa ketergantungan pada pemerintah
RENSTRA DISPORAPAR 2025-2029	Pembinaan (calon atlet) usia dini 6-12 tahun : identifikasi bakat olahraga melalui talent scouting di sekolah dan komunitas, kompetisi lokal tingkat sekolah atau kecamatan	Pembinaan dan pengembangan untuk membentuk atlet potensial yang siap berkompetisi di tingkat daerah dan provinsi (usia 13-18 tahun). Pelatihan teknik dan ketrampilan sesuai cabor yang diminati	Pencapaian prestasi olahraga dengan membina atlet unggulan untuk meraih prestasi nasional dan internasional (usia 18-25 tahun)	Peningkatan prestasi olahraga (pengiriman atlet untuk mengikuti pelatda, pelatnas ataupun pelatihan internasional; Menyediakan fasilitas latihan modern; Kompetisi berjenjang yang berkesinambungan)	Puncak prestasi dan keberlanjutan (keberlanjutan prestasi dan membentuk <i>role model</i> bagi generasi muda)

3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.

**Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISPORAPAR	KETERANGAN
1	2	3	3	5
1		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif	- Penguatan Gerakan Kesadaran kolektif <i>stakeholder</i>	- Membentuk forum koordinasi daerah yang mengintegrasikan program lintas OPD, komunitas, dan swasta; - Penyusunan <i>roadmap</i> kolaborasi <i>multi-stakeholder</i> untuk pariwisata dan ekonomi kreatif; - Pengembangan pariwisata berbasis komunitas agar masyarakat lokal menjadi pelaku utama; - Memperkuat prinsip <i>green tourism</i> dengan menjaga kelestarian lingkungan dan budaya
			- Pengembangan manajemen destinasi	- Pembentukan <i>Destination Management Organization (DMO)</i> di setiap destinasi unggulan; - Penetapan <i>masterplan</i> pengembangan pariwisata berbasis Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
			- Penguatan dan Penataan Organisasi Pengelolaan Destinasi	- Penguatan regulasi dan standarisasi pengelolaan destinasi agar sesuai standar internasional; Sertifikasi destinasi dan - pelaku usaha pariwisata berbasis <i>eco-label</i> dan CHSE (<i>Clean, Health, Safety, Environment</i>)
2		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>	- Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan pemuda	- Mendorong pemerataan pendidikan berkualitas, khususnya untuk pemuda di wilayah 3T dan perbatasan; Pengembangan literasi dasar : literasi membaca, numerasi, literasi sains, serta literasi digital

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DISPORAPAR	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan <i>soft skills</i> dan <i>life skill</i> pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan <i>soft skills</i> seperti komunikasi, kepemimpinan, <i>teamwork</i>, dan <i>problem solving</i>; - Penguatan karakter pemuda melalui program kepramukaan, kewirausahaan sosial, dan kegiatan kepemudaan berbasis nilai kebangsaan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong inkubasi bisnis bagi pemuda di bidang ekonomi kreatif, UMKM, dan teknologi digital; - Pengembangan hub inovasi pemuda sebagai pusat kreativitas dan inovasi regional
			<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Atlet Usia Dini Secara Terencana dan Berjenjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan pusat pembinaan daerah sebagai basis pelatihan usia dini; - Memberikan dukungan gizi, kesehatan, dan pendidikan karakter sejak dini
			<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kapasitas Pelatih dan Tenaga Pendukung 	<p>Standarisasi sertifikasi pelatih dan tenaga pendukung (fisioterapis, sport scientist, psikolog olahraga);</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan fasilitas pelatihan berstandar nasional; Revitalisasi fasilitas olahraga sekolah agar dapat digunakan untuk pembinaan atlet muda; Mendorong keterlibatan swasta dalam penyediaan sarana olahraga melalui skema kemitraan
			<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Kompetisi Berjenjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbanyak event olahraga usia dini untuk meningkatkan pengalaman bertanding; - Menjadikan kompetisi daerah sebagai basis seleksi nasional

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo. Program dan kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengampu 8 Program yang terdiri dari 3 (tiga) program pada urusan pemuda dan olahraga, 4 (empat) program pada urusan pariwisata dan 1 (satu) program non urusan. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.

Tabel 4.1 Program Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.030.000.000		8.119.400.000		8.240.600.000		8.408.800.000		8.606.000.000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					240.000.000		242.700.000		246.400.000		251.500.000		257.400.000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirusaha Pemuda (Persentase)	13,49	13,52	13,56	240.000.000	13,6	242.700.000	13,64	246.400.000	13,68	251.500.000	13,72	257.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					6.940.000.000		7.017.200.000		7.121.800.000		7.267.100.000		7.437.500.000	
Meningkatnya prestasi keolahragaan	Persentase atlet berprestasi (%)	29,15	46,75	46,8	6.940.000.000	46,85	7.017.200.000	46,9	7.121.800.000	46,95	7.267.100.000	47	7.437.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					850.000.000		859.500.000		872.400.000		890.200.000		911.100.000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	18,53	19,03	19,53	850.000.000	20,03	859.500.000	20,53	872.400.000	21,03	890.200.000	21,53	911.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					6.397.674.868		6.469.000.000		6.565.700.000		6.699.900.000		6.857.200.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.502.674.868		5.563.900.000		5.646.900.000		5.762.100.000		5.897.200.000	
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	79,8	79,88	80,04	5.502.674.868	80,16	5.563.900.000	80,28	5.646.900.000	80,4	5.762.100.000	80,5	5.897.200.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					785.000.000		793.800.000		805.700.000		822.200.000		841.500.000	
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yang layak, nyaman, dan berdaya saing melalui penerapan prinsip Sapta Pesona	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungannya (%)	28,57	28,57	29	785.000.000	30	793.800.000	31	805.700.000	32	822.200.000	33	841.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					40.000.000		40.500.000		41.200.000		42.100.000		43.100.000	
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (%)	11,09	11,09	12,09	40.000.000	13,09	40.500.000	14,09	41.200.000	15,09	42.100.000	16,09	43.100.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN					25.000.000		25.300.000		25.700.000		26.300.000		27.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Tumbuhnya usaha kreatif berbasis inovasi yang terlindungi secara hukum serta meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terkurasi HAKI (%)	0	20	21,66	25.000.000	22,22	25.300.000	22,5	25.700.000	22,66	26.300.000	24	27.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					45.000.000		45.500.000		46.200.000		47.200.000		48.400.000	
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Pelaku ekraf, Meningkatnya daya saing produk dan terbukanya akses ke jaringan pasar dan pembiayaan	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kapasitas/pengetahuan (%)	0	0,71	0,75	45.000.000	0,8	45.500.000	0,85	46.200.000	0,9	47.200.000	0,95	48.400.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					14427674868.00		14588400000.00		14806300000.00		15108700000.00		15463200000.00	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengampu 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengemban 1 urusan wajib non pelayanan dasar dan 1 urusan pilihan. Pada urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan pemuda dan olahraga terdapat 7 (tujuh) kegiatan dan terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan terkait dengan kepemudaan dan 4 (empat) kegiatan terkait dengan keolahragaan. Ketujuh kegiatan pada urusan pemuda dan olahraga ini memiliki output sebagai berikut :

- a. Output kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota adalah meningkatnya pemuda yang aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri, pemuda pelopor, dan pemuda kader dengan indikator kinerja :
 - Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi
 - Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda
 - Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
- b. Output kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja jumlah organisasi kepemudaan yang aktif;
- c. Output kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan adalah meningkatnya pembinaan dan pengembangan kepramukaan dengan indikator kinerja jumlah pembina pramuka yang bersertifikat;
- d. Output kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitas pendukung olahraga

pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah adalah terpenuhinya fasilitas pendukung olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dengan indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia;

- e. Output kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah meningkatnya kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota
- f. Output kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi adalah jumlah olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan dengan indikator kinerja :
 - Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
 - Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan
 - Jumlah penerima Penghargaan olahraga
- g. Output kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi adalah meningkatnya olahraga rekreasi yang dibina dan dikembangkan dengan indikator kinerja Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi

Selain urusan pemuda dan olahraga Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata juga mengampu kegiatan-kegiatan untuk urusan pariwisata sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Output kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten/Kota adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata dengan indikator kinerja :

- Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
- Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
- Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung prioritas nasional yaitu Asta Cita 3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim, industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- b. Output kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota adalah terwujudnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
 - Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- c. Output kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota adalah meningkatnya kenyamanan dan daya tarik destinasi pariwisata bagi wisatawan dengan indikator kinerja :
 - Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan
 - Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara
- d. Output kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota adalah terwujudnya peningkatan kepatuhan pelaku usaha pariwisata terhadap ketentuan perizinan berusaha dengan indikator kinerja Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan
- e. Output kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota adalah meningkatnya daya tarik, dan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata dengan indikator kinerja :
- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
- f. Output kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota adalah tersedianya ruang kreatif bagi pelaku ekonomi kreatif dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia
- g. Output kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keikutsertaan pada *event* yang bertujuan mempromosikan potensi ekonomi kreatif dengan indikator kinerja :
- Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual

- Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan
- Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
- Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah
- Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif
- Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung prioritas nasional yaitu Asta Cita 3 yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim, industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- h. Output kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar adalah terlaksananya pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku ekraf dengan indikator kinerja Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- i. Output kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif adalah terlaksananya pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku ekraf dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

**Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
- Meningkatnya Pemberdayaan pemuda	Meningkatnya Pemberdayaan pemuda				Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)		
					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
		Meningkatnya daya saing pemuda			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)		
					Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)		
		Meningkatnya daya saing kepemudaan			Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri, pemuda pelopor, dan pemuda kader	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
				Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Jumlah pembina pramuka yang bersertifikat	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
					Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya Prestasi Olahraga			Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional (Medali)		
		Meningkatnya prestasi keolahragaan			Persentase atlet berprestasi (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
				Prosentase fasilitas pendukung olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
				Jumlah olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Meningkatnya pengelolaan kepariwisataan daerah			Pengeluaran wisatawan (Milyar Rupiah)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yang layak, nyaman, dan berdaya saing melalui penerapan prinsip Sapta Pesona		Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungannya (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota yang terkelola	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Jumlah kawasan strategis yang dikelola sesuai dalam perencanaan pengembangan pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah destinasi wisata yang dikelola yang ditingkatkan kualitas amenitiesnya	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				jumlah usaha Pariwisata yang ditetapkan atau terdaftar	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (%)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah kegiatan pemasaran (event) pariwisata yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Tumbuhnya usaha kreatif berbasis inovasi yang terlindungi secara hukum serta meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk kreatif		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terkurasi HAKI (%)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah ruang kreatif yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
				Jumlah Forum ekosistem ekraf yang mendapatkan fasilitasi pemasaran ekraf	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah terlaksanakanya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	3.26.04.2.02.0017 - Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Pelaku ekraf, Meningkatkan daya saing produk dan terbukanya akses ke jaringan pasar dan pembiayaan		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kapasitas/pengetahuan (%)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Jumlah SDM ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan kapasitasnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah			Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah (%)		
				Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.26.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.26.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian Indikator Kinerja

- ❖ Uraian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum adalah ukuran yang menunjukkan kontribusi atau proporsi nilai tambah bruto dari sektor penyediaan akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator yang menjadi salah satu indikator dari aspek daya saing daerah ini datanya diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang dikeluarkan pada bulan Maret tahun berikutnya.

- ❖ Uraian Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks ini merupakan komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Indikator ini merupakan salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

- ❖ Uraian pengeluaran wisatawan

Pengeluaran wisatawan adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisata, baik sebelum keberangkatan, selama berada di destinasi, maupun dalam perjalanan pulang, untuk berbagai kebutuhan konsumsi maupun aktivitas lainnya yang terkait dengan perjalanan wisata. Tujuan dari dihitungnya indikator ini adalah :

- (a). Mengidentifikasi perputaran uang yang dihasilkan dari aktivitas wisatawan, seperti belanja untuk akomodasi, transportasi, makanan, dan oleh-oleh;
- (b). Menilai dampak *multiplier effect*, yaitu bagaimana pengeluaran wisatawan memicu pertumbuhan sektor lain seperti UMKM, pertanian, transportasi, dan industri kreatif;

- (c). Mengetahui jenis pengeluaran terbesar wisatawan sehingga pemerintah dan pelaku usaha dapat mengoptimalkan layanan dan produk;
- (e). Membantu menentukan strategi pengembangan destinasi berdasarkan potensi ekonomi yang dihasilkan

❖ Uraian Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri menggambarkan sejauh mana pemuda terlibat dalam aktivitas ekonomi yang dikelola secara mandiri, baik berupa wirausaha, usaha kreatif, usaha digital, maupun usaha berbasis komunitas. Indikator ini penting untuk menilai kemandirian ekonomi pemuda serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, seperti dalam bidang usaha mikro dan kecil, bisnis digital, industry kreatif, dan *start up*.

Manfaat dari indikator ini adalah untuk :

- a. Mengetahui potensi dan daya saing pemuda dalam sektor ekonomi;
- b. Memetakan peluang kerja baru yang diciptakan oleh pemuda;
- c. Menjadi dasar penyusunan program pemberdayaan ekonomi pemuda, seperti pelatihan, bantuan modal, dan pendampingan usaha

❖ Uraian Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar keterlibatan pemuda dalam kegiatan organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan maupun sosial kemasyarakatan. Indikator ini digunakan untuk menilai peran, kesadaran, dan kontribusi pemuda dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di suatu wilayah. Tujuan pengukuran ini adalah :

- a. Menilai kesadaran sosial pemuda dalam berkontribusi untuk Masyarakat;

- b. Meningkatkan kualitas program pembinaan pemuda agar lebih tepat sasaran.
- ❖ Uraian Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional Tujuan dan manfaat dari indikator ini adalah :
- Mengukur prestasi dan kinerja atlet;
 - Mengevaluasi program pembinaan olahraga;
 - Memperkuat *branding* daerah melalui prestasi olahraga;
 - Memfasilitasi *scouting* atlet berbakat dari daerah ke tingkat nasional;
 - Memetakan cabang olahraga yang berpotensi dikembangkan.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,57	1,84	1,9	1,95	2,01	2,06	2,12	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56	56,2	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Pengeluaran wisatawan	Milyar Rupiah	119,39	127,6	135,34	144,48	150,75	154,81	160,44	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	13,49	13,61	13,74	13,87	14	14,12	14,25	
3	Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	Medali	175	176	177	178	179	180	181	
4	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	15,17	15,3	15,42	15,55	15,68	15,8	15,93	

4.4 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dalam penyusunan RENSTRA 2025 – 2029 menggunakan 8 Program, 21 Kegiatan dan 54 Subkegiatan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.030.000.000		8.119.400.000		8.240.600.000		8.408.800.000		8.606.000.000		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				240.000.000		242.700.000		246.400.000		251.500.000		257.400.000		
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	13,49	13,56	240.000.000	13,6	242.700.000	13,64	246.400.000	13,68	251.500.000	13,72	257.400.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				235.000.000		217.700.000		221.400.000		226.500.000		232.400.000		
Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri, pemuda pelopor, dan pemuda kader	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	275	100	235.000.000	175	217.700.000	182	221.400.000	193	226.500.000	204	232.400.000		
	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2	10		10		10		10		10			
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	50	100		50		50		50		50			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				60.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	50	100	60.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000		
2.19.02.2.01.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				50.000.000		87.700.000		91.400.000		96.500.000		102.400.000		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	275	100	50.000.000	175	87.700.000	182	91.400.000	193	96.500.000	204	102.400.000		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				125.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2	10	125.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	20	1	5.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				5.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	20	1	5.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.940.000.000		7.017.200.000		7.121.800.000		7.267.100.000		7.437.500.000		
Meningkatnya prestasi keolahragaan	Persentase atlet berprestasi (%)	29,15	46,8	6.940.000.000	46,85	7.017.200.000	46,9	7.121.800.000	46,95	7.267.100.000	47	7.437.500.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000		700.000.000		700.000.000		849.900.000		1.037.500.000		
Prosentase fasilitas pendukung olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	5	849.900.000	6	1.037.500.000		
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				700.000.000		700.000.000		700.000.000		849.900.000		1.037.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	5	849.900.000	6	1.037.500.000		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				320.000.000		815.000.000		1.500.000.000		865.000.000		1.500.000.000		
Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	5	320.000.000	5	815.000.000	5	1.500.000.000	5	865.000.000	5	1.500.000.000		
	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	0		480		960		480		960			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				320.000.000		315.000.000		300.000.000		365.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	5	320.000.000	5	315.000.000	5	300.000.000	5	365.000.000	5	300.000.000		
2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				0		500.000.000		1.200.000.000		500.000.000		1.200.000.000		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	0	0	0	480	500.000.000	960	1.200.000.000	480	500.000.000	960	1.200.000.000		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				5.220.000.000		5.202.200.000		4.571.800.000		5.202.200.000		4.550.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah olahraga prestasi yang dibina dan dikembangkan	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	0	100	5.220.000.000	192	5.202.200.000	83	4.571.800.000	192	5.202.200.000	83	4.550.000.000		
	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	209	265		233		233		233		233			
2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				600.000.000		1.152.200.000		500.000.000		1.152.200.000		500.000.000		
Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	0	100	600.000.000	192	1.152.200.000	83	500.000.000	192	1.152.200.000	83	500.000.000		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				4.545.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	209	265	4.545.000.000	233	4.000.000.000	233	4.000.000.000	233	4.000.000.000	233	4.000.000.000		
2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				75.000.000		50.000.000		71.800.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	50.000.000	1	71.800.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				700.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2	2	700.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000		
2.19.03.2.05.0010 - Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				700.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2	2	700.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				850.000.000		859.500.000		872.400.000		890.200.000		911.100.000		
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	18,53	19,53	850.000.000	20,03	859.500.000	20,53	872.400.000	21,03	890.200.000	21,53	911.100.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				850.000.000		859.500.000		872.400.000		890.200.000		911.100.000		
Jumlah pembina pramuka yang bersertifikat	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2	2	850.000.000	2	859.500.000	2	872.400.000	2	890.200.000	2	911.100.000		
	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	100		119		144		180		222			
2.19.04.2.01.0003 - Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah				50.000.000		59.500.000		72.400.000		90.200.000		111.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	100	50.000.000	119	59.500.000	144	72.400.000	180	90.200.000	222	111.100.000		
2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				6.397.674.868		6.469.000.000		6.565.700.000		6.699.900.000		6.857.200.000		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.502.674.868		5.563.900.000		5.646.900.000		5.762.100.000		5.897.200.000		
Meningkatnya Nilai LHE AKIP PD	Nilai LHE AKIP PD (Nilai)	79,8	80,04	5.502.674.868	80,16	5.563.900.000	80,28	5.646.900.000	80,4	5.762.100.000	80,5	5.897.200.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	7	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000	8	10.000.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	12		12		12		12		12			
3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	7	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000		
3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	11	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.207.249.812		4.268.474.944		4.351.474.944		4.466.674.944		4.601.774.944		
Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35	4.207.249.812	37	4.268.474.944	37	4.351.474.944	40	4.466.674.944	40	4.601.774.944		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.197.449.812		4.258.674.944		4.341.674.944		4.456.874.944		4.591.974.944		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35	4.197.449.812	37	4.258.674.944	37	4.341.674.944	40	4.456.874.944	40	4.591.974.944		
3.26.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		4.800.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000		
3.26.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		25.200.000		
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	25.200.000	1	25.200.000	1	25.200.000	1	25.200.000	1	25.200.000		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1		1		1		1		1			
3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000		
3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.26.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.230.225.056		1.230.225.056		1.230.225.056		1.230.225.056		1.230.225.056		
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.230.225.056	12	1.230.225.056	12	1.230.225.056	12	1.230.225.056	12	1.230.225.056		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2		2		2		2		2			
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				201.582.376		201.582.376		201.582.376		201.582.376		201.582.376		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	201.582.376	12	201.582.376	12	201.582.376	12	201.582.376	12	201.582.376		
3.26.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.023.642.680		1.023.642.680		1.023.642.680		1.023.642.680		1.023.642.680		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.023.642.680	12	1.023.642.680	12	1.023.642.680	12	1.023.642.680	12	1.023.642.680		
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1				
3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			
3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			
3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				785.000.000		793.800.000		805.700.000		822.200.000		841.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yang layak, nyaman, dan berdaya saing melalui penerapan prinsip Sapta Pesona	Persentase destinasi pariwisata yang meningkat kunjungannya (%)	28,57	29	785.000.000	30	793.800.000	31	805.700.000	32	822.200.000	33	841.500.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				10.000.000		80.000.000		81.200.000		82.824.000		84.646.128		
Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/kota yang terkelola	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0	5	10.000.000	40	80.000.000	41	81.200.000	43	82.824.000	45	84.646.128		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	0		0		0							
	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1							
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				5.000.000		40.000.000		40.600.000		41.412.000		42.323.064		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	0	5	5.000.000	40	40.000.000	41	40.600.000	43	41.412.000	45	42.323.064		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				5.000.000		40.000.000		40.600.000		41.412.000		42.323.064		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	40.000.000	1	40.600.000	1	41.412.000	1	42.323.064		
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				25.000.000		60.000.000		60.900.000		62.118.000		63.484.596		
Jumlah kawasan strategis yang dikelola sesuai dalam perencanaan pengembangan pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0	0	25.000.000	0	60.000.000	0	60.900.000	0	62.118.000	0	63.484.596		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1					
3.26.02.2.02.0002 - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				25.000.000		60.000.000		60.900.000		62.118.000		63.484.596		
Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	25.000.000	1	60.000.000	1	60.900.000	1	62.118.000	1	63.484.596		
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				745.000.000		635.000.000		644.525.000		657.415.500		671.878.641		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah destinasi wisata yang dikelola yang ditingkatkan kualitas amenitasnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2	8	745.000.000	5	635.000.000	5	644.525.000	5	657.415.500	6	671.878.641		
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
3.26.02.2.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				220.000.000		110.000.000		111.650.000		113.883.000		116.388.426		
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi) (Lokasi)	1	2	220.000.000	1	110.000.000	1	111.650.000	1	113.883.000	1	116.388.426		
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				510.000.000		400.000.000		406.000.000		414.120.000		423.230.640		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2	8	510.000.000	5	400.000.000	5	406.000.000	5	414.120.000	6	423.230.640		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				10.000.000		110.000.000		111.650.000		113.883.000		116.388.426		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1	10.000.000	1	110.000.000	1	111.650.000	1	113.883.000	1	116.388.426		
3.26.02.2.03.0010 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5.000.000		15.000.000		15.225.000		15.529.500		15.871.149		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2	1	5.000.000	1	15.000.000	1	15.225.000	1	15.529.500	1	15.871.149		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		18.800.000		19.075.000		19.842.500		21.490.635		
jumlah usaha Pariwisata yang ditetapkan atau terdaftar	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	0	1	5.000.000	1	18.800.000	1	19.075.000	1	19.842.500	1	21.490.635		
3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko				5.000.000		18.800.000		19.075.000		19.842.500		21.490.635		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	0	1	5.000.000	1	18.800.000	1	19.075.000	1	19.842.500	1	21.490.635		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				40.000.000		40.500.000		41.200.000		42.100.000		43.100.000		
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (%)	11,09	12,09	40.000.000	13,09	40.500.000	14,09	41.200.000	15,09	42.100.000	16,09	43.100.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				40.000.000		40.500.000		41.200.000		42.100.000		43.100.000		
Jumlah kegiatan pemasaran (event) pariwisata yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	1	40.000.000	1	40.500.000	1	41.200.000	1	42.100.000	1	43.100.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	2	1		5.000.000		5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					5.000.000		5.000.000		5.200.000		5.200.000		5.700.000		
Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1		5.000.000		5.000.000		5.200.000		5.200.000		5.700.000		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					10.000.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		11.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1	1	10.000.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	11.000.000		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.900.000		20.900.000		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.900.000	2	20.900.000		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				25.000.000		25.300.000		25.700.000		26.300.000		27.000.000		
Tumbuhnya usaha kreatif berbasis inovasi yang terlindungi secara hukum serta meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terkurasi HAKI (%)	0	21,66	25.000.000	22,22	25.300.000	22,5	25.700.000	22,66	26.300.000	24	27.000.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Jumlah ruang kreatif yang tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	2	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif				5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	2	1	5.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000		
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				20.000.000		18.300.000		18.700.000		19.300.000		20.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Forum ekosistem ekraf yang mendapatkan fasilitasi pemasaran ekraf	Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	1	1	20.000.000	1	18.300.000	1	18.700.000	1	19.300.000	1	20.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	0		0		0		0		0			
3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan				0		0		0		0		0		
Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.04.2.02.0015 - Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual				10.000.000		3.300.000		3.700.000		4.300.000		5.000.000		
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual (Dokumen)	1	2	10.000.000	1	3.300.000	1	3.700.000	1	4.300.000	1	5.000.000		
3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				0		0		0		0		0		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.04.2.02.0017 - Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif				10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				45.000.000		45.500.000		46.200.000		47.200.000		48.400.000		
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Pelaku ekraf, Meningkatnya daya saing produk dan terbukanya akses ke jaringan pasar dan pembiayaan	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan kapasitas/pengetahuan (%)	0	0,75	45.000.000	0,8	45.500.000	0,85	46.200.000	0,9	47.200.000	0,95	48.400.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				20.000.000		30.500.000		31.200.000		32.200.000		33.400.000		
Jumlah SDM ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	150	20	20.000.000	30	30.500.000	31	31.200.000	32	32.200.000	33	33.400.000		
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20.000.000		30.500.000		31.200.000		32.200.000		33.400.000		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	150	20	20.000.000	30	30.500.000	31	31.200.000	32	32.200.000	33	33.400.000		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				25.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan kapasitasnya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	30	25	25.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				25.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	30	25	25.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000		

4.5 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdapat beberapa kegoatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah.

1. Pariwisata

"SAE Wisata": Program ini selaras dengan **Asta Cita 6 (Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi)** dimana dalam Asta Cita ini menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan. Sejalan dengan Asta Cita 6, arah kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang selaras adalah **Jatim Sejahtera** yaitu **peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur melalui berbagai program sosial dan ekonomi**. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian dalam pembangunan dan pengembangan sektor ini harus memperhatikan beberapa hal agar dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Probolinggo berkomitmen mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Probolinggo dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Ramah Lingkungan

Mendukung pelestarian lingkungan dan ketahanan pangan terutama Kawasan konservasi sebagai daerah tangkapan air, bank plasma nuftah dan keanekaragaman hayati.

b. Ramah Sosial Budaya

Pengembangan pariwisata bertanggung jawab untuk mendukung pelestarian budaya dengan Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dengan pengembangan desa wisata serta peningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memeuhi standar nasional dan internasional.

c. Ramah Ekonomi dan Investasi

Memadukan konsep *Green, Blue, dan Sirculair* ekonomi dalam pengembangan pariwisata sebagai jembatan menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta membuka peluang kerjasama investasi swasta untuk pengembangan wisata berkualitas.

d. Ramah Wisatawan

Memberikan pelayanan prima dan pengalaman total kepada wisatawan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta pelayanan yang standar kepada wisatawan baik lokal, domestik dan internasional.

e. Tata Kelola yang Integratif dan Efektif

Pengembangan kolaborasi untuk pembangunan pariwisata dengan para *stakeholder / hexahelix partnership*. Pengembangan berbasis partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Aktivitas yang mendukung SAE Wisata adalah **100 Desa Wisata, 100 Event Wisata, dan Unit Kesehatan Wisata (UKW)**.

2. Ekonomi Kreatif

“SAE MILENIAL” : Program ini merupakan program yang mendukung pencapaian tujuan dari **Asta Cita 3 (Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan)** dimana Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan **Asta Cita 4 (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender)** yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor Pembangunan sebagai acuan pembangunan .Sedangkan arah pembangunan Propinsi Jawa Timur yang selaras adalah **Jatim Sejahtera** (Peningkatan

kesejahteraan masyarakat Jawa Timur melalui berbagai program sosial dan ekonomi) dan **Jatim Kerja** (Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi). Sejalan dengan hal tersebut. Aktivitas yang mendukung SAE Milenial adalah **1.000 Kreator Milenial, Milenial Job Center – Hub Ekraf di Setiap Kecamatan.**

“SAE KESEMPATAN KERJA” : Sebagaimana SAE MILENIAL, program prioritas SAE KESEMPATAN KERJA juga mendukung pencapaian tujuan dari **Asta Cita 3 (Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan)** dan **Asta Cita 4 (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender)**, serta **Jatim Kerja** (Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi). Aktivitas yang mendukung SAE Kesempatan Kerja adalah **10 Rumah Kreatif Milenial.**

3. Pemuda dan olahraga

“SAE OLAHRAGA” : Program ini merupakan program yang mendukung pencapaian tujuan dari **Asta Cita 4 (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesetaraan Gender)** yang menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor Pembangunan sebagai acuan pembangunan. Sedangkan arah pembangunan Propinsi Jawa Timur yang selaras adalah **Jatim Harmoni** (Mengembangkan nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, memajukan seni budaya, dan prestasi olahraga) dan **Jatim Berdaya** (Memberdayakan masyarakat dan potensi daerah untuk kemajuan Bersama). Aktivitas yang mendukung SAE Kesempatan Kerja adalah **100 KOMPETISI Olahraga Berbasis Karifan Lokal.**

Tabel 4.5 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yang layak, nyaman, dan berdaya saing melalui penerapan prinsip Sapta Pesona	<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SAE WISATA (100 Desa Wisata)
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SAE WISATA (100 Desa Wisata)
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	SAE WISATA (Pembentukan Unit Kesehatan Wisata)
2	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>	
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	SAE WISATA (100 Event Wisata)
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Tumbuhnya usaha kreatif berbasis inovasi yang terlindungi secara hukum serta meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk kreatif	<i>Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi Dan Berintegrasi Bagi Insan Kreatif Di Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	SAE KESEMPATAN KERJA (10 Rumah Kreatif Milenial) SAE MILENIAL (Milenial Job Center: Hub Ekonomi Kreatif di Setiap Kecamatan)
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan keterampilan dan pengetahuan Pelaku ekraf, Meningkatnya daya saing produk dan terbukanya akses ke jaringan pasar dan pembiayaan	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	
			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	SAE MILENIAL (1.000 Kreator Lokal)
			<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	SAE MILENIAL (Milenial Job Center: Hub Ekonomi Kreatif di Setiap Kecamatan)
5	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	SAE MILENIAL (1.000 Kreator Lokal)
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	SAE MILENIAL (1.000 Kreator Lokal)
6	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatnya prestasi keolahragaan	<i>Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	SAE OLAHRAGA (Revitalisasi GOR)
			<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	SAE OLAHRAGA (100 Kompetisi Olahraga Berbasis Kearifan Lokal)

4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Indikator sasaran RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dijadikan indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.19.3.26.0.00.02.0000 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata									
2.	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56	56,2	
3.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,57	1,84	1,90	1,95	2,01	2,06	2,12	
4.	Prosentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	
5.	Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional	Medali	175	176	177	178	179	180	181	
6.	Pengeluaran wisatawan	Milyar Rupiah	119,39	127,60	135,34	144,48	150,75	154,81	160,44	
7.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	13,49	13,61	13,74	13,87	14,00	14,12	14,25	
8.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	15,17	15,30	15,42	15,55	15,68	15,80	15,93	

4.7 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan regulasi tersebut dan pedoman evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, IKK Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata meliputi :

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci RENSTRA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.	Jumlah Medali yang diperoleh dalam Kejuaraan	positif	Medali	175	176	177	178	179	180	181	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	Tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional										
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	positif	% Nilai	13,49	13,61	13,74	13,87	14	14,12	14,25	
4.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	positif	%	15,17	15,3	15,42	15,55	15,68	15,8	15,93	
5.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
6.	Pengeluaran wisatawan	positif	Milyar Rupiah	119,39	127,6	135,34	144,48	150,75	154,81	160,44	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan arah pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo sebagai Gerbang Wisata Jawa Timur serta mendukung pencapaian visi “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah, Religius Serta Eksis Berdaya Saing)”. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan yang terukur. RENSTRA menjadi landasan bagi seluruh jajaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsi, mulai dari perencanaan program hingga evaluasi kinerja, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja tahunan dan anggaran.

Dalam implementasinya, dokumen ini dirancang dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi dinamika pembangunan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan seiring dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal. Adaptabilitas ini penting untuk memastikan relevansi dan efektivitas pelaksanaan program dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang di sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

Pelaksanaan RENSTRA mencakup berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata secara menyeluruh. Diantara program-program tersebut, terdapat tiga program prioritas yang menjadi fokus utama dalam periode ini, yaitu (a). program SAE wisata untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Kabupaten Probolinggo dengan mengembangkan 100 desa sebagai destinasi wisata yang dikelola secara profesional dan terintegrasi; (b). program SAE Milenial untuk memberikan akses teknologi dan peluang kerja bagi generasi muda agar mereka dapat

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah mereka, serta (c). SAE olahraga untuk menyediakan sarana olahraga berkualitas sekaligus mendukung peningkatan kapasitas SDM keolahragaan serta menghidupkan kembali olahraga tradisional dan memperkaya budaya olahraga di Kabupaten Probolinggo.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RENSTRA berpedoman pada prinsip efektivitas dan efisiensi serta berpedoman pada asas kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh upaya yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan, olahraga serta pengembangan dan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif akan diterjemahkan dalam program kegiatan secara cermat dengan mempertimbangkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat umum.

Proses pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran yang terkait dilakukan secara transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab. Indikator-indikator utama yang diampu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo akan dipublikasikan secara terintegrasi ke dalam platform digital dan *dashboard* kinerja yang dapat diakses oleh public. Hal ini dilakukan agar para pemuda, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, stakeholder terkait, serta public secara umum dapat ikut berpartisipasi untuk mengawasi proses pelaksanaan serta dapat berperan memberikan saran dan kritik yang membangun terhadap jalannya program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo.

5.2 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Evaluasi kinerja dilakukan berjenjang mulai dari evaluasi bulanan untuk memantau progress kegiatan, evaluasi semesteran untuk menilai efektivitas program, serta evaluasi tahunan untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhir periode tahun 2029 akan dilaksanakan evaluasi untuk menilai pencapaian seluruh target RENSTRA dan menganalisis dampak jangka Panjang program yang dilaksanakan. Sistem pelaporan mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui laporan internal kepada Bupati serta stakeholder terkait. Selain laporan internal, laporan eksternal juga dibuat dan dipublikasikan melalui media resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo sebagai bentuk transparansi informasi publik bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.